



Tahun Anggaran 2022

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (408732)



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA BARAT
2022**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (BPHN) adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (BPHN) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (BPHN). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, 31 Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

DAFTAR ISI

Hal	
Kata Pengantar	1
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	10
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3. Basis Akuntansi	11
A.4. Dasar Pengukuran	11
A.5. Kebijakan Akuntansi	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1. Pendapatan	17
B.2. Belanja	17
B.3. Belanja Pegawai	18
B.4. Belanja Barang	18
B.5. Belanja Bantuan Sosial	19
B.6. Belanja Modal Tanah	19
B.7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19
B.8. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19
B.9. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	20
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	20
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	20
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	20
C.4. Piutang Bukan Pajak	20
C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	20
C.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran	20
C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	20
C.8. Belanja Dibayar di Muka	20
C.9. Persediaan	21
C.10. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	21
C.11. Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran	21
C.12. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	21
C.13. Tanah	21
C.14. Peralatan dan Mesin	21
C.15. Gedung dan Bangunan	22
C.16. Jalan, Irigasi dan Jaringan	22
C.17. Aset Tetap Lainnya	22
C.18. Akumulasi Penyusutan Tetap	22
C.20. Aset Tak Berwujud	22
C.21. Aset Lain-Lain	22
C.22. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	22
C.23. Uang Muka Dari KPPN	23
C.24. Utang Kepada Pihak Ketiga	23
C.25. Pendapatan Diterima di Muka	23
C.26. Ekuitas	23

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	24
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	24
D.2. Beban Pegawai	24
D.3. Beban Persediaan	24
D.4. Beban Jasa	24
D.5. Beban Pemeliharaan	24
D.6. Beban Perjalanan Dinas	24
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	24
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	24
D.9. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	25
D.10. Defisit Pos Luar Biasa	25
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	26
E.1. Ekuitas Awal	26
E.2. Surplus (Defisit) LO	26
E.3. Koreksi Penyesuaian Tahun Berjalan	26
E.4. Koreksi Nilai Persediaan	26
E.5. Koreksi Tetap Aset	26
E.6. Ekuitas Akhir	26
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	27
F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	27
F.2 Pengungkapan Lain-lain	27
F.3 Temuan dan Tindak Lanjut BPK	27
F.4 Rekening Pemerintah	27

Laporan-Laporan Pendukung

- Neraca Percobaan
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca
- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Realisasi Anggaran Belanja
- Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
- Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah

Lampiran / Data Dukung

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (BPHN) yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan **Tahun Anggaran 2021**. Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, 31 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah



R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (BPHN) Periode Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 0,-

Realisasi Belanja Negara pada Periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1.094.466.934,- atau mencapai 99.9% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.095.541.000- .

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Periode Tahun 2021.

Nilai Aset Periode Tahun 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 0,-. Aset Tetap sebesar Rp. 0,- dan Aset Lainnya (Neto) sebesar Rp. 0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 0,- yang berupa kewajiban sebesar Rp. 0,- dan Ekuitas sebesar Rp. 0,-

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 1.094.466.934,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (1.094.466.934),-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (1.094.466.934),-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal adalah sebesar Rp. 0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (1.094.466.934),- kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Rp. 0,- serta ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 1.094.466.934,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal, 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 0,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT (BPHN)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2022		% thd Angg	Per 31 Desember 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	#DIV/0!	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Barang	B.4	1.095.541.000	1.094.466.934	99,90	1.087.638.158
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		1.095.541.000	1.094.466.934	99,90	1.087.638.158
Belanja Modal					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6			0,00	
Belanja Penambah Nilai Peralatan dan M	B.7	-	-	0,00	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	
Belanja Penambah Nilai Gedung dan Ban	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Perencanaan & Pengawasan	B.10			0,00	
Belanja Modal Lainnya	B.11	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Modal		-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH BELANJA		1.095.541.000	1.094.466.934	99,90	1.087.638.158

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT (BPHN) NERACA

PER 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	-	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	-	-
Hibah yang belum disahkan	C.25	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	-	-
JUMLAH EKUITAS			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT (BPHN)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 dan Tahun 2020

URAIAN	CATATAN	31/12/2022	31/12/2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan (barang dan jasa)	D.3	568.057.800	653.223.103
Beban Jasa	D.4	-	-
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	526.409.134	434.415.055
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		1.094.466.934	1.087.638.158
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.094.466.934)	(1.087.638.158)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
-Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
-Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.094.466.934)	(1.087.638.158)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.094.466.934)	(1.087.638.158)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT (BPHN)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31/12/2022	31/12/2021
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.094.466.934)	(1.087.638.158)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.094.466.934	1.087.638.158
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	-	-
EKUITAS AKHIR	E.6	-	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (BPHN). Laporan ini dihasilkan melalui sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah system yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan, Lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta Laporan Manajerial Lainnya. dan Aset

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (BPHN) adalah 1 (satu) satuan kerja. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 1 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	0200	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (BPHN)	-	1	-	-	1
Jumlah			-	1	-	-	1

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (BPHN) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (BPHN) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (BPHN) adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
*(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)*

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN 	100%

9. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

10. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per, 30 Juni 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 0,-** atau mencapai **0 %** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp. 0,-**.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2022

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 1.094.466.934 ,-** atau **99.9%** dari anggaran belanja sebesar **Rp. 1.095.541.000,-** Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	1.095.541.000	1.094.466.934	99,90
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal			0,00
Total Belanja Kotor	1.095.541.000	1.094.466.934	99,90
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	1.095.541.000	1.094.466.934	99,90

B.3 BELANJA PEGAWAI

Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Divisi Imigrasi) pada Tahun Anggaran Tahun 2022 tidak memiliki Anggaran Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0 ,-** dan **Rp. 0,-**. Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar 0% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021

URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	0	0	0
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	0
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0
Belanja Tunj. Anak PNS	0	0	0
Belanja Tunj. Struktural PNS	0	0	0
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	0
Belanja Tunj. PPh PNS	0	0	0
Belanja Tunj. Beras	0	0	0
Belanja Uang Makan	0	0	0
Belanja Tunjangan Umum PNS	0	0	0
Belanja Lembur	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja	0	0	0

B.4 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 1.094.466.934,-** dan **Rp. 1.087.638.158,-**. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0.63 % dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang sudah berangsur berjalan new normal.

Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021

URAIAN	REALISASI T.A 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	84.085.700	55.059.900	-
Belanja Barang Non Operasional	444.031.100	550.838.203	(19,39)
Belanja Barang Persediaan	0	-	-
Belanja Jasa	39.941.000	47.325.000	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	526.409.134	434.415.055	21,18
Jumlah Belanja Kotor	1.094.466.934	1.087.638.158	0,63
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.094.466.934	1.087.638.158	0,63

B.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

B.6 BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

B.7 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2021 yaitu sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran Tahun 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena Tahun 2022 tidak memiliki belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0%
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0%
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0%

B.8 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

B.9 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rekening Bank	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per, tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** (nihil).

C.3 Kas Lainnya Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per, tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,-** (nihil).

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per, tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** (nihil).

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per, tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,-** (nihil).

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per, tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,-** (nihil).

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,-** (nihil).

C.8 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per, tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per, 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 tersaji dibawah ini :

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Persediaan	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,-** (nihil). Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.11 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per, tanggal Per, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** (nihil).

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** (nihil).

Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat per, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

C.14 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

C.15 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp 0,-** dan **Rp. 0,-** (nihil)

C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp .0,-** (nihil)

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

C.19 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

C.20 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-

C.21 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-

C.22 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Uang Muka dari KPPN	-	-
Jumlah	-	-

C.23 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.24 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPNP.

C.25 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**,

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS).

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp.0,-**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 568.057.800,-** dan **Rp. 653.223.103,-**. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan / atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	T.A 2022	Pengembalian Belanja
Beban Bahan	119.810.100	-
Beban Barang Non Operasional	316.421.000	-
Beban Barang Operasional-Penanganan Pand	84.085.700	
Beban Jasa Pos dan Giro		
Beban Honor Output Kegiatan	7.800.000	
Beban Jasa Profesi	3.000.000	-
Beban Jasa -penanganan Pandemi COVID-19	33.941.000	
Beban Sewa	3.000.000	
Beban Aset Ekstrakomptable		
Jumlah	568.057.800	-
Beban Barang dan Jasa		568.057.800

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 526.409.134,-** dan **Rp. 434.415.055,-**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan

Rincian beban perjalanan dinas untuk Tahun Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	T.A 2021	Pengembalian Belanja	T.A 2020
Beban Perjalanan Biasa	449.629.937	(895.803)	289.045.055
Beban Perjalanan Tetap	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.845.000		76.300.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		-	69.070.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	74.830.000	-	
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	-	-	-
Jumlah	527.304.937	(895.803)	434.415.055
Beban Perjalanan Dinas		526.409.134	

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** (Nihil) dan **Rp. 0,-**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan..

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan Tahun 2021

URAIAN	31 Desember 2022	2021	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Pjg	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	-	-

D.10 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp. 0,-** (nihil)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp.0,-**

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar **Rp. (1.094.466.934),-** dan **Rp. (1.087.638.158),-**. Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan yaitu penyesuaian Nilai Aset yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-** (nihil) diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-** (nihil)

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-** (nihil)

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2 Pengungkapan Lain-Lain

F.3 Temuan dan Tindak Lanjut BPK

-

F.4 Rekening Pemerintah

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 06 **DITJEN IMIGRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 013060200KD **BA(013) ES1(06) JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 408732 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 31/01/23 7:50 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 30/01/23 8:16 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	568,057,800	653,223,103	(85,165,303)	(13.038)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	526,409,134	434,415,055	91,994,079	21.177
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 06 **DITJEN IMIGRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 013060200KD **BA(013) ES1(06) JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 408732 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 31/01/23 7:50 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 30/01/23 8:16 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,094,466,934	1,087,638,158	6,828,776	0.628
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,094,466,934)	(1,087,638,158)	(6,828,776)	0.628
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1,094,466,934)	(1,087,638,158)	(6,828,776)	0.628
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1,094,466,934)	(1,087,638,158)	(6,828,776)	0.628

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN IMIGRASI 06
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG 408732

Waktu Olap: 2023-01-30 20:08:55.0 [B@4cd26896
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 31/01/23 7:50 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,095,541,000	1,094,466,934	(1,074,066)	100	1,095,541,000	1,087,638,158	7,902,842	100
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 06

DITJEN IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : 0200

JAWA BARAT

SATUAN KERJA : 408732

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG

Tgl Data 30/01/23 8:01 PM

Tgl. Cetak 31/01/2023 7:50 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,094,466,934
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	84,085,700	0
3.0	521211	Beban Bahan	119,810,100	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	7,800,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	316,421,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,000,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,000,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	33,941,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	448,734,134	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,845,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	74,830,000	0
JUMLAH			1,094,466,934	1,094,466,934

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 408732

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN IMIGRASI
JAWA BARAT
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG

Tgl Data 30/01/23 8:14 PM

Tgl. Cetak 31/01/2023 7:51 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,094,466,934
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	84,085,700	0
3.0	521211	Belanja Bahan	119,810,100	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	7,800,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	316,421,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,000,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,000,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	33,941,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	449,629,937	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	895,803
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,845,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	74,830,000	0
JUMLAH			1,095,362,737	1,095,362,737

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 06 **DITJEN IMIGRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0200 **JAWA BARAT**
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 408732 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG**

Tgl Data : 30/01/23 8:16 PM
Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 31/01/23 7:50 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,094,466,934)	(1,087,638,158)	(6,828,776)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,094,466,934	1,087,638,158	6,828,776	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	-
EKUITAS AKHIR	0	0	0	-

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN IMIGRASI
KDUAPPAW : 013060200KD BA(013) ES1(06) JAWA BARAT
KODE SATKER : 408732 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG

Tgl Data 30/01/23 8:15 PM
Tgl. Cetak 31/01/2023 7:50 AM
lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	
-------------------------------------	----------	----------	----------	--

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 06 **DITJEN IMIGRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0200 **JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 408732 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 31/01/23 7:51 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 30/1/23 8:04 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	56,700,000	84,102,000	84,085,700	0	84,085,700	99.98	16,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	56,700,000	84,102,000	84,085,700	0	84,085,700	99.98	16,300
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	135,860,000	119,935,000	119,810,100	0	119,810,100	99.9	124,900
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	21,300,000	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	273,186,000	316,421,000	316,421,000	0	316,421,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	430,346,000	444,156,000	444,031,100	0	444,031,100	99.97	124,900
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	28,295,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	6,700,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	61,380,000	33,978,000	33,941,000	0	33,941,000	99.89	37,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	96,375,000	39,978,000	39,941,000	0	39,941,000	99.91	37,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	457,560,000	449,630,000	449,629,937	895,803	448,734,134	100	895,866
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,600,000	2,845,000	2,845,000	0	2,845,000	100	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	74,830,000	74,830,000	0	74,830,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	47,960,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	512,120,000	527,305,000	527,304,937	895,803	526,409,134	100	895,866
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,095,541,000	1,095,541,000	1,095,362,737	895,803	1,094,466,934	99.98	1,074,066
	JUMLAH BELANJA	1,095,541,000	1,095,541,000	1,095,362,737	895,803	1,094,466,934	99.98	1,074,066

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 408732
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN IMIGRASI
BA(013) ES1(06) JAWA BARAT
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 31/01/23 7:51 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --rekon17
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	56,700,000	84,102,000	84,085,700	0	84,085,700	99.98	16,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	56,700,000	84,102,000	84,085,700	0	84,085,700	99.98	16,300
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	61,380,000	33,978,000	33,941,000	0	33,941,000	99.89	37,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	61,380,000	33,978,000	33,941,000	0	33,941,000	99.89	37,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	118,080,000	118,080,000	118,026,700	0	118,026,700	99.95	53,300
	JUMLAH BELANJA	118,080,000	118,080,000	118,026,700	0	118,026,700	99.95	53,300